



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MOHAMAD NADIR
2. Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3. NHK : 486692

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 710.000.000

1. Tanah Seluas 10707 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 1909 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 1404 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 624 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/48.75 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 84.000.000

1. MOTOR, HONDA NC11B1C A/T Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA HY.42 SEDAN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2BJ/SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 100.000.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 19.750.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 913.750.000



III. HUTANG

Rp. 136.980.723

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 776.769.277

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.